



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA**

Jln. Tjilik Riwut KM. 4,5 Kelurahan Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya
Telp. (0536) 3222837 / www.pta-palangkaraya.go.id / ptapraya@gmail.com

Nomor : 1354/KPTA.W16-A/TI1.1.1/XI/2024 Palangka Raya, 11 Nopember 2024
Lampiran : -
Hal : **Pendataan dan Himbauan Aplikasi
Satuan Kerja Peradilan Agama**

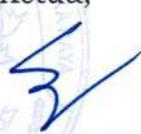
Yth.
**Ketua Pengadilan Agama
Se Kalimantan Tengah**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 3219/DJA/TI1.1.1/XI/2024 tanggal 8 Nopember 2024 perihal sebagaimana tersebut di atas, terkait ditemukannya banyak aplikasi yang berkembang di seluruh satuan kerja Peradilan Agama, maka kami instruksikan kepada saudara agar dapat mengisi form pendataan sebagaimana terlampir. Data paling lambat kami terima tanggal 13 Nopember 2024 dan dikirim ke email ptapraya@gmail.com (dalam bentuk pdf serta file excel/word).

Selanjutnya, dihimbau untuk pembuatan aplikasi baru di satuan kerja tingkat pertama maupun banding Peradilan Agama agar sebelum diberlakukan untuk melalui proses verifikasi, validasi dan persetujuan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, terima kasih.

Wassalam
9 Wakil Ketua,

Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.
NIP. 196206051992031006

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya (sebagai laporan).



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RT 2, Cempaka Putih Timur,
Kec. Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 3219/DJA/TI.1.1.1/XI/2024 Jakarta, 08 November 2024
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Pendataan dan Himbauan Aplikasi Satuan Kerja Peradilan Agama

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syarriyah Aceh
Se-Indonesia

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan instruksi Pimpinan Mahkamah Agung RI perihal ketertiban SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), dan ditemukannya banyak aplikasi yang berkembang di seluruh satuan kerja Peradilan Agama. Untuk itu dimohon Pengadilan Tinggi Agama agar mendata dan memverifikasi seluruh aplikasi apa saja yang ada di satuan kerja tingkat pertama dan tingkat banding. Pendataan dapat diisi melalui link <https://cloud.badilag.net/s/7Sp5aHoT85Dy3fd>

Untuk pengisian pendataan dengan cara mengunduh form yang ada di link, setelah terisi agar menginput kembali (form pdf yang sudah disahkan Ketua beserta file soft copy) ke folder sesuai satuan kerja yang berada didalam link yang disediakan, dan diharap paling lambat diinput Jum'at 15 November 2024.

Selanjutnya, dihimbau untuk pembuatan aplikasi baru di satuan kerja tingkat pertama maupun banding Peradilan Agama agar sebelum diberlakukan untuk melalui proses verifikasi, validasi dan persetujuan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RT 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat, DKI
Jakarta Kode Pos 10640

www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

FORM PENDATAAN APLIKASI SATUAN KERJA PERADILAN AGAMA 2024

NO	NAMA APLIKASI	SINOPSIS APLIKASI	TANGGAL PEMBERLAKUAN	STATUS APLIKASI (Masih berjalan/tidak)	PROGRAMMER / PENANGGUNG JAWAB APLIKASI
Pengadilan Tinggi Agama					
1.					
Dst.					
Pengadilan Agama					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
Dst.					

Mengetahui
Ketua Pengadilan

.....

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

